

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM  
NOMOR 769/DJPSDKP.3/TU.140/IV/2025

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP  
Dari : Direktur Pengendalian Operasi Armada  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Direktorat POA  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 17 April 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengukuran kinerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada Periode Triwulan I Tahun 2025, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat POA Triwulan I tahun 2025 sebesar 104,34 dengan kategori Baik yang diperoleh dari capaian 7 (tujuh) Indikator kinerja yang ditetapkan targetnya pada Triwulan I tahun 2025;
2. Sesuai dengan penghitungan dan verifikasi, hasil capaian IKU dimaksud sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Triwulan I		
	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100	100	100%
2. Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	20	23,33	116,87%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82	95,35	118,28%
4. Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	90	94,92	116,28%
5. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100%
6. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100	100	100%
7. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja (%) lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100%

Sumber : Kinerjaku

3. Berdasarkan data tersebut di atas, maka seluruh IKU Level II Direktorat POA Triwulan I tahun 2025 tercapai dari target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada Periode Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana terlampir pada pranala: [https://bit.ly/LKJ TWI POA 2025](https://bit.ly/LKJ_TWI_POA_2025).

Demikian kami sampaikan, atas arahan Bapak Direktur Jenderal lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Saiful Umam**

Tembusan:  
Sekretaris Ditjen PSDKP



## DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA



# LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I 2025

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat, sekaligus perwujudan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Disusun secara objektif, LKj ini diharapkan menjadi sarana evaluasi yang efektif sekaligus pendorong untuk peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dan *Logical Framework* sebagai kerangka strategis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Fokus pelaksanaan program selama Triwulan I Tahun 2025 mencakup lima bidang utama:

1. Pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP);
2. Operasional pusat pengendalian;
3. Penyediaan logistik dan pengawakan kapal pengawas;
4. Operasional armada pengawasan;
5. Perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas.

Kita patut bersyukur, karena berbagai indikator kinerja strategis berhasil dicapai secara optimal, khususnya dalam mendukung kinerja Eselon I serta prioritas kementerian. Hal ini tidak terlepas dari sinergi seluruh jajaran, baik di pusat maupun di lapangan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan hari ini adalah hasil dari kerja keras kolektif, dan tantangan ke depan memerlukan komitmen yang lebih besar. Oleh karena itu, laporan ini juga kami posisikan sebagai dasar refleksi dan rujukan dalam proses perbaikan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Direktorat POA.

Semoga, laporan ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dalam mendorong terciptanya birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.



**Saiful Umam, S.St.Pi, M.M**

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Jakarta, 17 April 2025

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Saiful Umam, S.St.Pi, M.M

# Tim Penyusun

---

## Penanggungjawab

Direktur Pengendalian Operasi Armada

## Koordinator Pelaporan Direktorat POA

1. Ema Velayati, S.St.Pi
2. Ikrom Bungsu, S.Pi
3. Vandra Anggriawan, SH
4. Hamzah Abdulloh, A.Md

## Kontributor Pelaporan Direktorat POA

1. Arseto Rahadyawan, ST
2. Edwin Haryanto, S.Tr.Pi
3. Bilmantasya Al Fattha, ST
4. Bernadette Maradita Hapsari, S.Pd
5. Husain, S.Kom
6. Atika Fauziah

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	2
Tim Penyusun .....	4
Daftar Isi .....	5
Daftar Tabel .....	6
Daftar Gambar .....	7
Daftar Lampiran .....	8
Ringkasan Eksekutif .....	9
BAB I .....	13
Pendahuluan .....	13
Latar Belakang .....	14
Maksud dan Tujuan .....	15
Isu Strategis Tahun 2024 .....	16
Tugas dan Fungsi Direktorat POA .....	17
Sistematika Penyajian .....	19
BAB II .....	20
Perencanaan Kinerja .....	20
RENSTRA DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024 .....	21
Perjanjian Kinerja Dit. POA .....	24
ALOKASI ANGGARAN .....	27
BAB III .....	28
Akuntabilitas Kinerja .....	28
Pengukuran Capaian Kinerja .....	29
Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja .....	31
Realisasi Anggaran .....	74
BAB IV .....	77
Penutup .....	77
A. 69	
B. 69	
LAMPIRAN .....	79

# Daftar Tabel

Tabel 1. Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA TW II 2024	10
Tabel 2. Target dan Realisasi IKU-1 TW II Tahun 2024	33
Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-2 TW II Tahun 2024	34
Tabel 4. Komponen Perhitungan IKU 2	35
Tabel 5. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2024	35
Tabel 6. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi Januari-Juni 2024	36
Tabel 7. Daftar Keaktifan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Juni 2024	39
Tabel 8.. Target dan Realisasi IKU 3 Periode TW II Tahun 2024	40
<i>Tabel 9.</i> Target dan Realisasi IKU 4 Periode TW II Tahun 2024	42
<i>Tabel 10.</i> Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW II Tahun 2024	43
Tabel 11. Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA TW II Tahun 2024	46
Tabel 12. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan TW II Tahun 2024	47
<i>Tabel 13.</i> Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW II Tahun 2024	48
<i>Tabel 14.</i> Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW II Tahun 2024	48
<i>Tabel 15.</i> Target dan Realisasi IKU 8 Periode TW II Tahun 2024	50
<i>Tabel 16.</i> Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW II Tahun 2024	51
<i>Tabel 17.</i> Target dan Realisasi IKU 10 Periode TW II Tahun 2024	52
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 11 Periode TW II Tahun 2024	53
Tabel 19. Hasil Penilaian (Survey) BKI Pada Tahun 2024	54
Tabel 20. Target dan realisasi IKU-12 periode Tahun 2024	55
Tabel 21. Rincian Pembangunan Prasarana di UPT	56
Tabel 22. Target dan realisasi IKU-13 periode TW II Tahun 2024	57
Tabel 23. Target dan realisasi IKU 14 periode Tahun 2024	58
Tabel 24. Target dan realisasi IKU-15 periode TW II Tahun 2024	59
Tabel 25. Target dan Realisasi IKU 16 Periode TW II Tahun 2024	61
Tabel 26. Target dan Realisasi IKU-17 Periode TW II Tahun 2024	62
Tabel 27. Target dan realisasi IKU 18 periode TW II Tahun 2024	63
Tabel 28. Target dan realisasi IKU 19 periode TW II Tahun 2024	64
Tabel 30. Rincian target dan realisasi IKU-20 periode TW II Tahun 2023	65
Tabel 31. Target dan realisasi IKU 21 periode TW II Tahun 2024	67
Tabel 32. Target dan realisasi IKU 22 periode TW II Tahun 2024	68
Tabel 33. Target dan realisasi IKU 23 periode TW II Tahun 2024	70
Tabel 34. Target dan realisasi IKU-24 periode TW II Tahun 2024	71
Tabel 35. Target dan realisasi IKU-24 periode TW II Tahun 2024	72
Tabel 36. Target dan realisasi IKU-26 periode TW II Tahun 2024	73
Tabel 37. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW II Tahun 2024	74

# Daftar Gambar

---

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA	17
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2024	29
Gambar 4. Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	32
Gambar 5 Tangkapan Layar Aplikasi Si Susan	41
Gambar 6 Ilustrasi Operasi Pesawat Patroli	44
Gambar 7 Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikhan) oleh Kapal Pengawas	47
Gambar 8. Pengisian Bahan Bakar Minyak KP Hiu Macan Tutul 02	49

# Daftar Lampiran

---

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	80
Lampiran 2	Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli	83
Lampiran 3	Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas	87

# Ringkasan Eksekutif

Sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini merefleksikan komitmen Direktorat POA terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Peta Strategis Direktorat POA Tahun 2025, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahun 2025–2029.

Sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) menetapkan 5 sasaran kegiatan dan 24 indikator kinerja (IK) sebagai tolok ukur pelaksanaan program. Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja Direktorat POA mencapai 104,52%.

Dalam aspek pelaksanaan anggaran, Direktorat POA telah merealisasikan 9 Rincian Output (RO) sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025. Adapun pagu anggaran Direktorat POA ditetapkan sebesar Rp261.077.977.000 (dua ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Tahun 2025 sebesar Rp16,333,733,126 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 6,26%.

Dalam merealisasikan anggaran, Direktorat POA mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Direktorat POA. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada senantiasa melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan tindaklanjutnya dapat diantisipasi dan disiapkan mitigasinya.

Realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode TW I Tahun 2025, ditabulasikan pada Tabel 1 berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN I		
					T	R	%
	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80	-	-	-
	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	2	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)	82	-	-	-
	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	3	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100	100	100	100
		4	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	82	20	23,33	116,67
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82	82	95,35	116,28
		6	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100	-	-	-
	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	7	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	-	-	-
		8	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95	90	94,92	105,47
		9	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100
		10	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80	-	-	-
	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan	11	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	-	-	-

prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	12	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100	-	-	-
	13	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (nilai)	82	-	-	-
	14	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)	81	-	-	-
	15	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)	100	-	-	-
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	16	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA (%)	95	-	-	-
	17	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	81	-	-	-
	18	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	88	-	-	-
	19	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100	100	100	100

		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	95	100
		21	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	80	-	-	-
		22	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA (unit)	1	-	-	-
		23	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	80	-	-	-
		24	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70	-	-	-
<b>Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA</b>						<b>104.34</b>	



# Pendahuluan



# Latar Belakang

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Melalui fungsi pengawasan, pemerintah memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ini.

Seiring penguatan tata kelola, pilar pengawasan kini semakin kokoh dengan kewenangan yang mencakup pemantauan dan pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. Dengan cakupan wewenang yang komprehensif tersebut, sistem pengawasan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia.

Keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak lepas dari sinergi dan kinerja optimal berbagai direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Di antara jajaran tersebut, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) menempati posisi yang sangat strategis. Dengan mandat besar mencakup penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, penyiapan logistik dan operasi kapal pengawas, hingga pengoperasian armada laut dan udara serta pemeliharaan pusat kendali, peran Direktorat POA menjadi poros penting dalam mendukung efektivitas pengawasan di lapangan.

Untuk menjalankan tugas besar tersebut secara andal, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja yang komprehensif. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi menyeluruh terhadap hasil kerja yang dicapai. Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik, Direktorat POA juga diwajibkan untuk menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran atas hasilnya.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Dokumen ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja selama periode berjalan, tetapi juga menjadi instrumen evaluatif yang berharga sebagai bahan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

# Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat POA periode Triwulan I Tahun 2025 disusun dengan tujuan yaitu:

Penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh stakeholder dan masyarakat kelautan dan perikanan.

Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di

# Tantangan Pengawasan Tahun 2025

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat POA dalam pengendalian operasi armada, antara lain:

1. Praktik *IUU fishing* yang masih terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Praktik penangkapan ikan ilegal seringkali diikuti dengan aktifitas perbudakan (*slavery*) dan perdagangan orang (*people smuggling*) diperlukan koordinasi dan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Badan Keamanan Laut (Bakamla).
2. Pemeriksaan terhadap pemanfaatan ruang laut, kawasan konservasi, pesisir pulau-pulau kecil, pengambilan pasir laut ilegal, dan pencemaran belum optimal dilakukan oleh kapal pengawas.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan baik berupa armada operasi (kapal pengawas dan speedboat) maupun prasarana perkantoran dan fasilitas penunjang operasi pengawasan SDKP lainnya yang masih jauh dari kondisi ideal. Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern.
4. Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

# Tugas dan Fungsi Direktorat POA

Tugas Direktorat Pengendalian Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN- KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hingga triwulan I 2025, Direktorat POA dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh 6 (enam) Ketua Tim Kerja yaitu: (1) Tim Kerja Prasarana dan Sarana, (2) Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi dan Intelijen, (3) Pengawakan dan Logistik, (4) Pengoperasian Kapal Pengawas dan Pesawat Patroli (5) Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, (6) Dukungan Manajerial. Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA



Adapun Direktorat Pengendalian Operasi Armada memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada



pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;

2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas; dan
5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

# Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

## Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2025 serta sistematika penyajian laporan.

## Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2025- 2029 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2025.

## Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2025.

## Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2025 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang



# Perencanaan Kinerja

# Perjanjian Kinerja Dit. POA

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil pada tahun 2025, dibuat dokumen perjanjian kinerja sebagaimana terdapat pada lampiran 1. Adapun Rincian Indikator Kinerja yang menjadi target pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

	<p><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN</b> <b>SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346 LAMAM <a href="http://www.kkp.go.id">www.kkp.go.id</a> SUREL <a href="mailto:dijjenpstlkkp@kkp.go.id">dijjenpstlkkp@kkp.go.id</a></p>
<p align="center"><b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025</b> <b>DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA</b></p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Saiful Umam Jabatan : Direktur Pengendalian Operasi Armada</p> <p>Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Pung Nugroho Saksono Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p> <p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p align="right">Jakarta, 14 Januari 2025</p>	
<p align="center">Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>  <p align="center">Pung Nugroho Saksono</p>	<p align="center">Pihak Pertama Direktur Pengendalian Operasi Armada</p>  <p align="center">Saiful Umam</p>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN**  
**SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80
2	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	2	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
3	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	3	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		4	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	82
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82
		6	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100
4	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	7	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		8	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95
		9	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
		10	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	11	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		12	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100

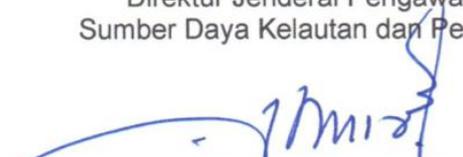
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		13	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (nilai)	82
		14	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)	81
		15	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)	100
6	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	16	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA (%)	95
		17	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	81
		18	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	88
		19	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		21	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	80
		22	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA (unit)	1
		23	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	80
		24	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

Data anggaran:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	255.425.477.000
	b. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.322.000.000
	c. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	330.500.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>261.077.977.000</b>

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama  
Direktur Pengendalian Operasi Armada



Saiful Umam

## ALOKASI ANGGARAN

Dalam mendukung Indikator Kinerja tersebut, dialokasikan anggaran dalam merealisasikan Rincian Output Lingkup Direktorat POA ditabulasikan sebagai berikut:

NO	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (000)	VOLUME
2350. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		255,425,477	
1	RCG. 001. Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	37,105,207	122 Unit
2	QHD. 001 Operasi Kapal Pengawas (Hari Operasi)	176,070,270	31 Hari Operasi
3	QHD. 002. Operasi Pesawat Patroli (Hari Operasi)	40,000,000	140 Hari Operasi
4	BKB. 001 Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau	1,183,000	4 Laporan
5	FBA. 001. Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada	547,000	25 Pemerintah Daerah
6	AFA. 001. NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	220,000	1 NSPK
7	ABW. 001. Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	300,000	1 Rekomendasi
2352. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		5,322,000	
8	RDS. 001. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3,811,000	1 Unit
9	ACA. 001 Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1,511,000	4000 Produk
2353. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan		330,500	
10	BKB. 001. Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	330,500	12 Laporan
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>261,077,977</b>	

# ***Akuntabilitas Kinerja***



# Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA TW I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 104,52% dengan capaian indikator Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berwarna HIJAU dengan kategori BAIK. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2025

NKO Maret - 2025

Unit Kerja : DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

Skor Kinerja : 104.52

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗ salurkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s.d. Maret	Capaian s.d. Maret	%	Tgl Input
<b>SK.01</b>	<b>Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif</b>											
IKSK.1	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
<b>SK.02</b>	<b>Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif</b>											
IKSK.02.1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
<b>SK.03</b>	<b>Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi</b>						110,27			110,27		
IKSK.03.1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di VPP NRI	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.03.2	Indeks Pengembangan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	82,00	20,00	23,33	116,66	20,00	23,33	116,66	23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.03.3	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Indeks	Maximize	Rata-rata	82,00	82,00	95,35	116,28	82,00	95,35	116,28	23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.03.4	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	Maximize	Nilai Positif Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
<b>SK.04</b>	<b>Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif</b>						103,28			103,28		
IKSK.04.1	Indeks operasi kapal pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	92,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.04.2	Indeks operasi pesawat patroli	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	99,00	90,00	94,92	105,47	90,00	94,92	105,47	23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.04.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.04.4	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
<b>SK.05</b>	<b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetapan</b>											
IKSK.05.1	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	%	Maximize	Nilai Positif Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.05.2	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	Indeks	Maximize	Rata-rata	100,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.05.3	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.05.4	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	%	Maximize	Nilai Positif Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.05.5	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	%	Maximize	Nilai Positif Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
<b>SK.06</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>						100,00			100,00		
IKSK.06.1	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Positif Akhir	99,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.2	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.3	Nilai PM SAKIP Sater lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	86,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.5	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tidak lanjutnya telah dianggapi dan disampaikan	%	Maximize	Rata-rata	99,00	99,00	99,00	100,00	99,00	99,00	100,00	23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.7	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA	Inovasi	Maximize	Nilai Positif Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.8	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpendikat Menaja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.9	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		23-Apr-2025 12:02
	Tambah Data Dukung+											

Tutup

# Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

## SASARAN KEGIATAN 1

### TERSELENGGARANYA SOSIALISASI PENYADARTAHUAN MASYAKARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA EFEKTIF

#### 1. Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja “Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan” bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta peserta sosialisasi khususnya peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Capaian Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test) yang peserta Bimtek berasal dari stakeholder atau para pemilik kapal perikanan.

Tabel 2. Target dan Realisasi IKU-1 TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat realisasi dikarenakan pengukuran akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA yang tinggi dalam memastikan terlaksananya Bimtek SPKP di bidang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

2. Perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang menjadi prioritas untuk pemahaman para pemilik Kapal Perikanan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp 149.050.000.

## **2. Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas**

Sistem pengawasan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat adalah pendekatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan melibatkan keikutsertaan dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan mereka, mendeteksi potensi masalah atau ancaman, serta berkontribusi dalam penanganan situasi yang mungkin mengganggu keamanan dan ketertiban.

Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif. Supervisi oleh Satker Pusat untuk kegiatan pembinaan Pokmaswas yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi perlu dilakukan karena beberapa alasan berikut:

Koordinasi dan Pengawasan, Supervisi oleh Satker Pusat memungkinkan adanya koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi. Dengan adanya supervisi, Satker Pusat dapat memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.

Peningkatan Kualitas, Supervisi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembinaan Pokmaswas. Satker Pusat dapat memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan

Monitoring dan Evaluasi, Melalui supervisi, Satker Pusat dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai dengan baik.

Pengalaman dan Pengetahuan, Satker Pusat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam pembinaan Pokmaswas. Dengan melakukan supervisi, mereka dapat berbagi pengalaman terbaik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Pemda Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan

Dengan melakukan supervisi oleh Satker Pusat, diharapkan bahwa kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas diperoleh dari kualitas kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan Pokmaswas dengan merujuk pada Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:

Gambar 4. Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas

v



Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-2 TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, belum terdapat realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV. Namun Direktorat POA telah melakukan Kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap masing-masing Provinsi berupa koordinasi via online berupa komunikasi via Whatsapp, telepon komunikasi, dan zoom.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp330.500,000,000, hingga TW I tahun 2025 dan telah terealisasi sebesar Rp4,372,500 atau 1,32 % dari alokasi anggaran.

### 3. Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI

Indikator Kinerja “Persentase Cakupan Pemantauan SDKP di WPP NRI” bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap aktifitas atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kegiatan yang dipantau antara lain: Aktifitas kapal perikanan berizin pusat WPP NRI, Aktifitas kapal dikawasan konservasi, Kejadian pencemaran perairan, Pemanfaatan ruang laut dan Aktifitas kapal yang melakukan pemanfaatan sedimentasi. Direktorat POA memastikan Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memanfaatkan teknologi pemantauan antara lain: a) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), b) *Automatic Identification System (AIS)*, c) Citra Satelit, d) Air Surveillance (foto Udara) dan e) SMS/WA Gateway.

Sekurang kurangnya dalam sebulan terpantau dengan salah satu kegiatan pemanfaatan SDKP menggunakan salah satu teknologi pemantauan pada WPP NRI.

Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), Ditjen PSDKP. Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA periode Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Target dan Realisasi IKU-3 TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Cakupan Pemantauan SDKP di WPP NRI	-	-	-							100	100	100			

Berdasarkan tabel di atas, target untuk IKU 3 dapat dicapai secara maksimal. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian pada periode triwulan 1 tahun 2025 sebesar 100% atau dengan kata lain target tercapai sepenuhnya. Adapun capaian dimaksud diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Formulasi rumus perhitungan capaian Cakupan WPPNRI

Formula:

$$x = (x1/x2) \cdot 100\%$$

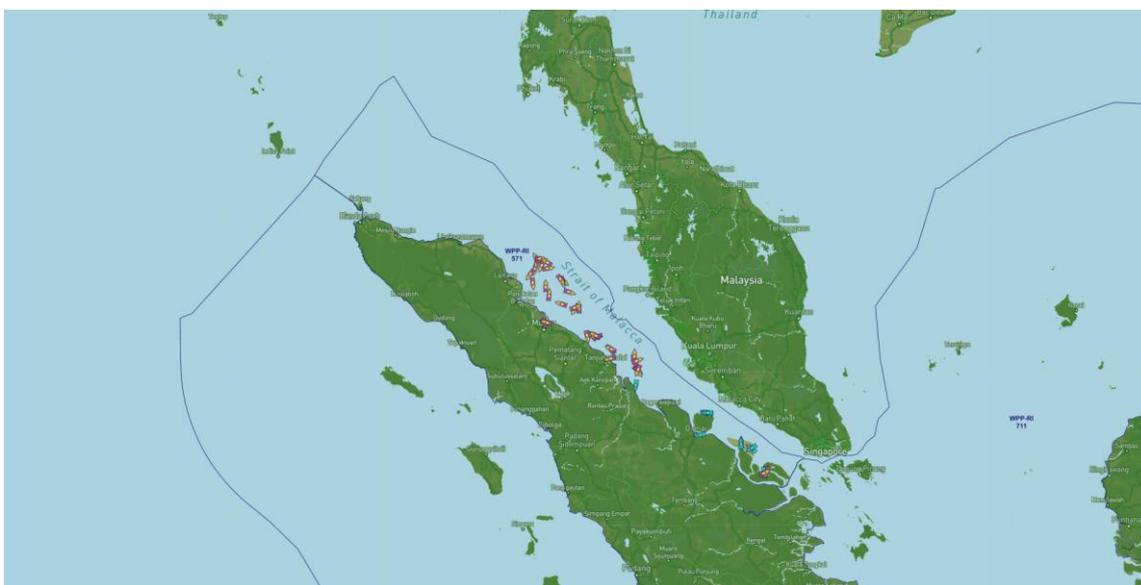
Keterangan:

x: Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%)

x1: Jumlah WPP NRI yang dipantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP

x2: Jumlah WPP NRI

	<b>X1 =</b>	<b>11 WPPNRI</b>		
	<b>X2 =</b>	<b>11 WPPNRI</b>		
<b>Capaian</b>	<b>TW I</b>	<b>=</b>	<b>(11/11)x 100% = 100%</b>	



Gambar 5. Ilustrasi Pemantauan menggunakan VMS periode TW I 2025



Gambar 6. Ilustrasi Pemantauan menggunakan AIS periode TW I 2025

**Analisa Pemantauan Kapal Perikanan**  
 1 Januari 2025 pukul 07:00 WIB s.d 20 Januari 2025 pukul 07:00 WIB

SANGAT RAHASIA



Gambar 7. Kawasan Konservasi yang dipantau periode Januari 2025

**Tabel Cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) menggunakan Vessel Monitoring System (VMS) TRIWULAN I 2025**

No	Wilayah WPPNRI	Bulan			Ket
		Jan	Feb	Mar	
1	WPP NRI 571	✓	✓	✓	Terpenuhi
2	WPP NRI 572	✓	✓	✓	Terpenuhi

3	WPP NRI 573	✓	✓	✓	Terpenuhi
4	WPP NRI 711	✓	✓	✓	Terpenuhi
5	WPP NRI 712	✓	✓	✓	Terpenuhi
6	WPP NRI 713	✓	✓	✓	Terpenuhi
7	WPP NRI 714	✓	✓	✓	Terpenuhi
8	WPP NRI 715	✓	✓	✓	Terpenuhi
9	WPP NRI 716	✓	✓	✓	Terpenuhi
10	WPP NRI 717	✓	✓	✓	Terpenuhi
11	WPP NRI 718	✓	✓	✓	Terpenuhi

**Tabel Cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) menggunakan Automatic Identification System (AIS)**

**TRIWULAN I 2025**

No	Wilayah WPPNRI	Bulan			Ket
		Jan	Feb	Mar	
1	WPP NRI 571	✓	✓	✓	Terpenuhi
2	WPP NRI 572	✓	✓	✓	Terpenuhi
3	WPP NRI 573	✓	✓	✓	Terpenuhi
4	WPP NRI 711	✓	✓	✓	Terpenuhi
5	WPP NRI 712	✓	✓	✓	Terpenuhi
6	WPP NRI 713	✓	✓	✓	Terpenuhi
7	WPP NRI 714	✓	✓	✓	Terpenuhi
8	WPP NRI 715	✓	✓	✓	Terpenuhi
9	WPP NRI 716	✓	✓	✓	Terpenuhi
10	WPP NRI 717	✓	✓	✓	Terpenuhi
11	WPP NRI 718	✓	✓	✓	Terpenuhi

## **4. Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP**

Indikator Kinerja “Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Direktorat POA memastikan pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan kepada user pengguna hasil analisis dilakukan secara akuntabel. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), Ditjen PSDKP. Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA periode Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU-4 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	20	21,67	108,35%	20	25	125%	20	25	125%	20	23,33	116,67	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, target untuk IKU 4 dapat dicapai secara maksimal, bahkan melampaui target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024, terjadi depresiasi capaian sebesar 8,33% dikarenakan pada bulan Februari tidak ada permintaan data untuk mendukung operasi kapal pengawas dan air surveillance. Adapun indeks 23,33 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 6. Komponen Perhitungan IKU 2

No	Indikator	Bulan			Bobot	Perhitungan
		JAN	FEB	MAR		
1	Indikasi Pelanggaran	1	1	1	40	10
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	20	5
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	20	5
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	0	1	20	3,33
<b>Indeks</b>						<b>23,33</b>

Berdasarkan tabel 4 diatas, angka 1 pada capaian bulanan tersebut menunjukkan tercapainya pemenuhan data realisasi perkomponen pada IKU 4. Sedangkan angka 0 menunjukkan tidak terpenuhi data realisasi perkomponen pada IKU 4.

Indikator ini dipengaruhi oleh 4 sub indikator yaitu: Indikasi Pelanggaran, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Data untuk Operasi Kapal Pengawas/Airborne Surveillance.

#### 1. Indikasi Pelanggaran

Indikasi pelanggaran adalah sebuah analisis yang dilakukan terhadap kapal- kapal ikan yang terdaftar di dalam sistem pemantauan kapal perikanan berkaitan dengan berbagai indikasi pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan.

Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Hasil analisis tersebut lalu diterbitkan berupa lembar "Indikasi Pelanggaran" dan diberikan memo penyampaian setiap harinya kepada UPT terkait untuk dapat ditindak lanjuti. Untuk diketahui, Selama

periode TW I Tahun 2025, Pusdal PSDKP telah menerbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 1.058 kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Maret 2025

INDIKASI PELANGGARAN SPKP								TOTAL
Bulan	DPI	DPI (laut lepas)	Jalur Penangkapan	Pelabuhan Pangkal/Muat	Poaching	Tanpa SIPI/SIKP	Transshipment	
Jan	129	1	182	45	75	0	4	436
Feb	100	4	179	44	22	0	7	356
Mar	52	2	179	29	3	1	0	266
<b>TOTAL</b>	<b>281</b>	<b>7</b>	<b>540</b>	<b>118</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1058</b>

## 2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2025 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 63 kapal berizin pusat yang terpantau melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam Tabel 6:

Tabel 8. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi Jan s/d Maret 2025

NO	NAMA KAWASAN	JUMLAH
1	KAWASAN KONSERVASI BIAK NUMFOR	4
2	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH KEPULAUAN BABAR PROVINSI MALUKU	1
3	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU	1
4	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH TIMUR PULAU BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1
5	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT	1

NO	NAMA KAWASAN	JUMLAH
1	KAWASAN KONSERVASI BIAK NUMFOR	4
6	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN SIKKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2
7	KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	3
8	KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN NATUNA	3
9	KAWASAN KONSERVASI KOLEPOM	14
10	KAWASAN KONSERVASI LINGGA	4
11	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ANGSANA, SUNGAI LOBAN, PULAU LAUT-PULAU SEMBILAN, KEPULAUAN SAMBARGELAP, DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	6
12	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BURUWAY, ARGUNI, KAIMANA, TELUK ETNA, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	3
13	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KEPULAUAN ARU BAGIAN TENGGARA DAN LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU	1
14	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1
15	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU RAO-TANJUNG DEHEGILA DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA	1
16	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KUBU RAYA DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3
17	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAPANULI TENGAH DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	4
18	KAWASAN KONSERVASI PULAU BATANG DAN PULAU SEGAMA	1
19	KAWASAN KONSERVASI RUPAT UTARA	2
20	KAWASAN KONSERVASI SUMENEP	1
21	KAWASAN KONSERVASI SUNGAI BAKAU, SERUYAN HILIR TIMUR (SERUYAN)	1
22	KAWASAN KONSERVASI TANJUNG PANJANG	1
23	KAWASAN KONSERVASI TANJUNG TIRAM	1
24	TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA	2
25	TAMAN NASIONAL WAKATOBI	1
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>

### 3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan peraturan tersebut Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemantauan terhadap 39 kapal pengangkut ikan hidup yang terpantau aktif pada bulan Maret 2025.

Tabel 9. Daftar Keaktifan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Maret 2025

No	Bulan	Jumlah Kapal
1	Januari	37
2	Februari	41
3	Maret	39

#### 4. Data untuk Operasi Kapal Pengawas / Airborne Surveillance

Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan airborne surveillance. Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap periode pemantauan.

Tabel 10. Data Sebaran Kapal Perikanan sebagai Bahan Operasi bulan Maret 2025

No	Bulan	Ops Kapal Pengawas dan AS	Tanggal	Operasi	Jumlah Dokumen	Akumulasi
1	Januari	<i>Airborne Surveillance dan Operasi KP</i>	26 Januari 2025	11 WPP NRI	1	1
2	Februari	<i>Airborne Surveillance dan Operasi KP</i>	-	-	0	1
3	Maret	<i>Airborne Surveillance dan Operasi KP</i>	20 Maret 2025	WPP NRI 711	1	2

Keberhasilan dalam mencapai target IKU ini dipengaruhi oleh terpenuhinya seluruh komponen dan upaya maksimal Direktorat POA khususnya Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kapal Pengawas serta keterlibatan pimpinan dalam melakukan monitoring secara rutins.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp3,811,000,000,00 dan sampai dengan TW I tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 88,213,291,00 atau 2,31% dari alokasi anggaran.

## 5. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan

unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengisian kuesioner Sistem Kepuasan Masyarakat Layanan SPKP menggunakan *digital form* pada *tools* Survei Kepuasan (Aplikasi SUSAN) KKP, dimana hasil penilaian pengguna SPKP langsung diolah secara otomatis pada Aplikasi SUSAN. Aplikasi SUSAN KKP merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pusdatin KKP dalam rangka untuk membantu pengambilan responden dan menghitung nilai SKM yang sesuai dengan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SKM Secara Realtime. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Layanan penerbitan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.

2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan

Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sekaligus untuk memantau kapal perikanan.

3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan

Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanan dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	80	92,34	115,43%	80	93,75	117,19%	81	96,34	118,94%	82	95,35	116,28	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 95,35 dari target sebesar 82 sehingga persentase capaian sebesar 116,28%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat *selisih/depresiasi* sebesar 2,66%.

Potret hasil survei kepuasan masyarakat periode TW I Tahun 2025 berdasarkan Aplikasi SUSAN KKP sebagai berikut :

**Gambar 8.** Tangkapan Layar Aplikasi SUSAN KKP

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
psdkp	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	2025	1	4.94	95.35	104

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP serta peningkatan kinerja pada tahun 2025 beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna SPKP;
2. Adanya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp 288,148,000,00 dan belum ada realisasi anggar

## **6. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

Sampai dengan periode triwulan I 2025, Indikator ini belum terdapat realisasi capaian, pengukuran direncanakan dilaksanakan pada Triwulan IV 2025.

## 7. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasi Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 4 variabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Objek Kelautan;
2. Cakupan Wilayah Pengawasan;
3. Tindak Lanjut Target Operasi;
4. Hasil Dukungan Operasi Lainnya.

Tabel 12. Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)							87,6	96,19	109.8%	70	95,12	135,88	-	-	-	89	95,12	106.8%

Pengukuran capaian kinerja operasi kapal pengawas akan dilaksanakan pada TW IV 2025 dengan target indeks kinerja operasi kapal pengawas pada tahun 2025 adalah sebesar 92. Sampai dengan TW I 2025, hanya dilakukan update capaian kegiatan operasi Kapal Pengawas yang telah melaksanakan operasi.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan di akhir tahun disebabkan oleh adanya dinamika perubahan kebijakan dan proyeksi ketidakpastian di masa mendatang, yang berdampak pada hasil operasi kapal pengawas yang masih terbatas. Dengan demikian, pengukuran kinerja secara menyeluruh baru dapat dilakukan pada akhir tahun TW IV 2025, meskipun target dan spesifikasi kinerja yang ditetapkan masih tetap berlaku.



Gambar 9. Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikan) oleh Kapal Pengawas

Adapaun sampai dengan periode TW I Tahun 2025, Kapal Pengawas telah melaksanakan Operasi Mandiri sebanyak 27 hari operasi yang melibatkan 10 unit Kapal Pengawas, dengan rata-rata hari operasi untuk setiap kapal pengawas adalah 3,4 hari. Selama periode ini, Kapal Pengawas berhasil memeriksa sebanyak 49 kapal (49 Kapal Ikan Indonesia/KII dan 0 Kapal Ikan Asing/KIA). Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 1 kapal (1 KII dan 0 KIA) berhasil ditangkap.

Tabel 13. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan TW I Tahun 2025

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	DIPERIKSA			DITANGKAP		
			KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	KP. ORCA 01	0	0	0	0	0	0	0
2	KP. ORCA 02	5	0	0	0	0	0	0
3	KP. ORCA 03	7	0	0	0	0	0	0
4	KP. ORCA 04	10	10	0	10	1	0	1
5	KP. ORCA 05	0	0	0	0	0	0	0
6	KP. ORCA 06	0	0	0	0	0	0	0
7	KP. BARAKUDA 01	0	0	0	0	0	0	0
8	KP. BARAKUDA 02	0	0	0	0	0	0	0
11	KP. PAUS 01	5	39	0	39	0	0	0
12	KP. AKAR BAHAR 01	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Dalam pelaksanaan operasi Kapal Pengawas Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Optimalisasi penggunaan anggaran operasi kapal pengawas menjadi prioritas, yang berdampak pada penyesuaian intensitas operasi kapal pengawas di tahun ini, dimana hingga TW I 2025 masih belum banyak kapal pengawas yang melaksanakan operasi.
2. Pengukuran Kinerja Indeks Operasi Kapal Pengawas akan dilaksanakan pada akhir tahun TW IV 2025, setelah pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas berjalan.
3. Pelaksanaan operasi kapal pengawas diupayakan seefektif dan seefisien mungkin dengan dukungan logistik yang memadai sesuai rencana operasi. Penyusunan Rencana Operasi (RO) didasarkan pada data yang akurat dari Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP (Command Center) serta sumber informasi relevan lainnya.
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap progress capaian operasi kapal pengawas terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini Rp176,070,270,000,00 dan sampai dengan TW I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp12,074,884,864,00 atau 6,86% dari total pagu.

## **8. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli**

Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan).

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 20212			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	-	-	-	93	98,53	106%	91	100	109,9%	90	94,92	105,47	-	-

Berdasarkan data pada Tabel 10, Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi indeks kinerja tercatat sebesar 94,92, melampaui target sebesar 90, dengan persentase capaian mencapai 105,47%.



Gambar 10. Ilustrasi Operasi Pesawat Patroli

Capaian positif ini mengindikasikan bahwa target operasional pesawat patroli telah tercapai secara maksimal. Keberhasilan ini didukung oleh tercapainya target-target spesifik dalam operasi patroli, meliputi:

- Jumlah kapal perikanan yang dipantau sesuai target.
- Luas area pengawasan (*coverage area*) yang sesuai target.
- Jumlah hari operasi yang terealisasi sesuai target.
- Tindak lanjut yang efektif terhadap target operasi yang diberikan.
- Jumlah kapal yang berhasil divalidasi sesuai target.
- Pemberian dukungan pengawasan kawasan konservasi, pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang optimal.

Keberhasilan melampaui target pada Triwulan I Tahun 2025 ini tidak terlepas dari upaya pembinaan yang intensif dan berkelanjutan yang

dilakukan secara langsung oleh Direktur Pengendalian Operasi Armada selama periode bulanan. Pembinaan ini berperan penting dalam memastikan pelaksanaan operasi berjalan efektif dan efisien, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Selama periode operasi TW I Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) periode operasi dengan total jumlah hari operasi sebanyak 28 hari operasi. Adapun hasil capaian operasi Pesawat Patroli sampai dengan TW I adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Wilayah dan Hari Operasi sd. Triwulan I 2025

No	Periode	WPP	Hari Ops
1	Periode I	711, 712, 713, 573, 572	7
2	Periode I-A	711, 712	6
3	Periode II	712	5
4	Periode II-A	716, 717, 715	10

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana operasi yang memperhatikan wilayah dan jam operasi pesawat patroli untuk mencapai coverage area;
2. Pergerakan pesawat udara dilaksanakan pada wilayah-wilayah prioritas dengan indikasi kerawanan sedang dan tinggi serta meningkatkan operasi pengawasan terhadap kelautan yang berada pada wilayah-wilayah yang beririsan dengan pengawasan perikanan sehingga meningkatkan capaian operasi;
3. Pemanfaatan data dan informasi dari Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP (Command Center) yang mendukung operasi pengawasan SDKP melalui udara.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp40.000.000.000,00 (Nilai Blokir dan Efisiensi Rp. 17.300.204.000,-) dan sampai dengan TW I tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 6.762.158.263,- atau 29,97% dari alokasi anggaran.

## 9. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Indikator ini digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas dalam mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik dimaksud meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, sementara itu logistik personel terdiri dari : Bahan Makanan, Air Tawar, Alat-alat Pelayanan (ATK dan Bahan Komputer), dan senjata api. Capaian TW I tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan TW IV di tahun 2023 maka capaian realisasi relatif sama, namun untuk alat-alat pelayanan pada TW I bulan maret tidak dapat dilakukan sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran Dit POA, sehingga mengakibatkan hilangnya anggaran untuk pemenuhan alat2 pelayanan. untuk itu pada bulan Maret tidak terdapat pengajuan dan realisasi anggaran. Sementara itu, tidak terdapat target pada Renstra 2022-2025. Adapun rincian capaian setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW I Tahun 2025

No	Komponen	Target	Realisasi	%
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (30%)	30%	30%	100
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (20%)	20%	20%	100
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (25%)	25%	25%	100
4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (15%)	15%	15%	100
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (5%)	5%	5%	100
6	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)	5%	5%	100
Total Nilai		100	100	100

Kegiatan pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengisian bahan bakar sesuai dengan jadwal pengajuan BBM kapal pengawas, melaksanakan pemenuhan bahan makanan/natura, air bersih, minyak pelumas, alat - alat pelayanan dan pelaporan senjata api tepat waktu sesuai dengan periode triwulanan yang telah di tetapkan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kapal pengawas terkait pelaksana pekerjaan secara berkala terkait pengisian bbm melalui aplikasi SIGOTIK (Online maupun secara manual) dan juga monev terkait pelaksanaan pengadaan bahan makan/natura, air bersih, minyak pelumas,

alat-alat pelayanan dan pemenuhan senjata api;

3. Melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan pihak Pertamina baik di pusat maupun di UPT PSDKP;
4. Menyusun dokumen manajemen risiko dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan Logistik.



**Gambar 11.** Pengisian Bahan Bakar Minyak KP Orca 01 dan Pemenuhan Minyak Pelumas KP. Paus 01

Keberhasilan mencapai target IKU pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Komitmen dari Direktur Pengendalian Operasi Armada dalam kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik mendukung penangkapan ikan terukur berbasis kuota maupun operasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menertibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan bisa Lestari. Untuk mendukung kegiatan tersebut Direktorat POA memaksimalkan ketersediaan logistik Kapal Pengawas;
2. Pemantauan manajemen risiko dengan cara mengawasi dan memantau risiko secara terus menerus serta melakukan tinjauan berkala terhadap efektivitas strategi pengelolaan risiko; dan
3. Optimalisasi penggunaan Sistem Pengendalian Logistik (SIGOTIK).

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 6 ini Rp176,070,270,000,00 dan sampai dengan TW I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp12,074,884,864,00 atau 6,86% dari total pagu.

## 10. Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas

Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) merupakan ukuran kesiapan ASN AKP (Kelas I – IV) berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara. Rincian capaian IKU 10 Direktorat POA periode TW I Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 10 Periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Sampai dengan periode Triwulan I 2025 belum terdapat realisasi capaian target dikarenakan pengukuran dilaksanakan pada periode akhir tahun atau TW IV.

## 11. Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja “Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan” IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian jumlah armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dibangun di tahun berjalan.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 10 Periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan periode Triwulan I 2025 belum terdapat realisasi capaian target dikarenakan pengukuran dilaksanakan pada periode akhir tahun atau TW IV.

## 12. Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan

# Sarana Pengawasan SDKP

Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran (indeks) yang digunakan untuk menilai kualitas kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan yang telah dilakukan sehingga kapal pengawas dapat dinyatakan "Laik Operasi". Indeks kualitas dimaksud di atas didapatkan berdasarkan laporan hasil survey yang dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang menyatakan sebuah kapal pengawas yang telah disurvei masuk dalam kategori "Laik Operasi" atau "Tidak Laik Operasi".

Adapun capaian IKU Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP sampai dengan TW I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Target dan realisasi IKU 11 pada periode TW I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Sampai dengan periode Triwulan I 2025 indikator tersebut belum ada capaian, kegiatan dimaksud baru akan dilaksanakan pada periode TW IV atau pada akhir periode Semester II tahun 2025.

Survey kondisi dan penilaian teknis oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terhadap kapal pengawas yang berada dibawah kendali Direktorat Pengendalian Operasi Armada dilakukan menggunakan metode *Condition Assesment Programe (CAP)*, yaitu sebuah program penilaian kondisi kapal, baik lambung, permesinan, maupun sistem operasinya dimana hasil penilaian dari kondisi kapal tersebut akan disajikan dalam bentuk *CAP Grading* dengan skala 1 sampai dengan 4 dimana skor tertinggi yaitu pada skala 4 (empat) dengan predikat "excellent".

Dalam rangka mencapai target, terdapat beberapa hal yang sedang dan akan dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan pencegahan, perawatan prediktif, dan perawatan darurat secara efisien, efektif, dan berkesinambungan;
2. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas dengan pelaksana pekerjaan secara berkala;
3. Menyusun dokumen manajemen risiko, mengimplementasikan, dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan perawatan;
4. Menurunkan tim supervisi kegiatan perawatan secara berkala untuk melakukan pemantauan hasil perawatan dan memvalidasi detail pekerjaan di lapangan; dan
5. Senantiasa berkonsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait akuntabilitas pelaksanaan dan monitoring kegiatan perawatan dan

pemeliharaan kapal pengawas.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 11 ini sebesar Rp.300.000.000,00 dan sampai dengan akhir TW I tahun 2025 belum ada realisasi.

### 13. Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Nilai Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran untuk mengukur kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP, supervisi dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada dan hasilnya dituangkan dalam sebuah laporan hasil supervisi. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan SDKP. Metode pelaksanaan supervisi yaitu secara daring dan/atau kunjungan langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memonitor dan mengevaluasi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP di UPT lingkup Ditjen PSDKP.

Pada tahun 2025 Sarana Pengawasan SDKP yang dinilai meliputi : Kapal Pengawas Kapal Pengawas Kelas II sebanyak 7 unit, Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 17 unit, dan Kapal Pengawas Kelas V (*Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat*) sebanyak 67 unit. Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP meliputi perawatan pencegahan, perawatan prediktif dan perawatan darurat.

Capaian IKU 13 Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan sampai dengan TW I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 21. Target dan realisasi IKU 12 pada periode TW I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan periode TW I tahun 2025 belum ada capaian, penilaian capaian kinerja baru akan dilaksanakan pada TW IV atau tepatnya pada akhir Semester II. Nilai indikator kinerja ini didapatkan dari jumlah dokumen laporan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dilakukan di UPT lingkup Ditjen PSDKP.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target

realisasi IKU 12 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan jadwal supervisi yang tepat dan akurat sesuai kebutuhan.
2. Koordinasi yang baik dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kapal Pengawas.
3. Metode pelaksanaan supervisi yang efektif dan efisien.
4. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP secara berkala, rutin, dan tepat waktu.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 13 ini yaitu sebesar Rp.245.700.000,00 dan sampai dengan akhir TW I tahun 2025 belum ada realisasi karena anggaran masih diblokir efisiensi.

## 15. Persentase penyelesaian rancangan NSPK Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP

Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan. Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan. Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses *legal drafting*.

Tabel 22. Target dan realisasi IKU 15 periode Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase penyelesaian rancangan NSPK pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Untuk periode TW I tahun 2025 IKU Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP belum terdapat capaian. Pengukuran direncanakan pada TW IV tahun 2025. Adapun progress penyusunan NSPK dimaksud telah disusun identifikasi substansi dengan menghasilkan beberapa point sebagai berikut:

1. Rancangan Kepdirjen Standar Kapal Pengawas Kelas IV merupakan perubahan nama usulan rancangan Juknis. Semula: Kepdirjen Tentang Standarisasi Desain

Kapal Pengawas dan Spesifikasi Teknis.

2. Penyusunan draft Juknis menunggu pengesahan revisi Permen KP 4/2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas, karena ketentuan kapal pengawas kelas IV ini belum muncul di dalam Permen KP 4 2021

Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2024, tidak dapat dibandingkan dikarenakan tahun sebelumnya IKU tersebut diatas ditargetkan pada akhir tahun. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen Direktur POA dalam pemenuhan regulasi di bidang Prasarana dan Sarana. Hal ini karena pimpinan sangat memahami pentingnya/urgensi keberadaan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam menjamin operasional sistem pemantauan SDKP berjalan sesuai kaidah dan standar yang tinggi.
2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp200.000.000 dan belum terdapat realisasi karena anggaran pada kegiatan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP diblokir.

## SASARAN KEGIATAN 6

### TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM PENGAWASAN SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

## 16. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Direktorat POA. Realisasi anggaran yang tinggi juga sejalan dengan tingginya capaian output Direktorat Pengendalian Operasi Armada. Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa:

- Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
- Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel,
- dan Meminimalisir Deviasi halaman IV DIPA.

Tabel 23. Target dan realisasi IKU 16 periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan I 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada;
- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
- Membuat rencana penarikan dana serta proyeksi penyerapan.

## 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Profesional ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- ◆ Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- ◆ Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

### Pejabat Struktural:

DIKLAT PIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20 JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR: Pernah ikut (Nilai10), tidak pernah (nilai0)

### Pejabat Fungsional Tertentu:

DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)  
 SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Umum/ Staf:  
 DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)

<p>ASN Struktural :          (Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)</p> <p>ASN Fungsional :          (Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)</p> <p>ASN Staff:          (Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)</p>
--

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU-17 Periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	77	81.64	106	78	91.23	117	82	91.29	111.45				-	-

Sampai dengan periode TW I 2025 belum ada realisasi. Karena pengukuran dilakukan pada periode Triwulan IV 2025.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA sangat fokus dalam hal pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA;
2. Kesadaran yang tinggi pegawai Dit POA dalam pengembangan diri yang dilakukan secara daring maupun luring; dan
3. Pemenuhan IP ASN yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

## 18. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang

biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Tabel 25. Target dan realisasi IKU 18 periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan I 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- ♦ Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada; dan
- ♦ Melakukan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

## 19. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (IV) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 26. Target dan Realisasi IKU 19 Periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	100	100	100%	100	100	100%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada TW I Tahun 2025 telah berhasil dengan maksimal sesuai target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2024, capaian relatif sama dengan persentase 100%.

Pada Direktorat POA terdapat 13 (tiga belas) kegiatan yang menjadi prioritas pengendalian berbasis Manajemen Risiko antara lain:

Tabel 27. Daftar Kegiatan yang dikendalikan berbasis Manajemen Risiko

NO	RO	DAFTAR KEGIATAN
1	ABW	Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2	<b>ACA</b>	Pelaksanaan Pelayanan Publik SKAT
3	<b>AFA</b>	Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria
4	<b>BKB</b>	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau
5	<b>BKB</b>	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
6	<b>FBA</b>	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada
7	<b>QHD1</b>	Operasi Kapal Pengawas
8	<b>QHD1</b>	Penggunaan Anggaran PNBPN
9	<b>QHD2</b>	Operasional Pesawat Patroli
10	<b>RCG</b>	Armada Pengawasan SDKP yang dirawat
11	<b>RDS</b>	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional
12	-	Pengadaan KP PHLN
13	-	AKP PHLN

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA; dan
2. Pemantauan Pengendalian Manajemen Resiko yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

## 20. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

IKU ini menunjukkan Persentase Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat POA berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 28. Target dan realisasi IKU 20 periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	70	70	100	75	100	133,33	80	100	125	80	100	120	-	-	-
--	----	----	-----	----	-----	--------	----	-----	-----	----	-----	-----	---	---	---

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” bila dibandingkan periode yang sama tahun 2024 realisasi capaian terdapat sedikit penurunan (5%), tahun 2024 tercapai 125% sedangkan triwulan I 2025 tercapai 120%. Hal tersebut dipengaruhi oleh besaran jumlah rekomendasi yang dilengkapi. Namun demikian, capaian tahun 2025 sudah melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan tersebut, dipengaruhi oleh komitmen pimpinan beserta jajaran dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dengan melakukan monitoring bertahap dan konsisten.

## 21. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi :

### 1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

### 2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan

anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

### 3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Tabel 29. Target dan realisasi IKU 21 periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan I 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan dalam mengembangkan SDM Arsiparis Dit POA agar terciptanya Arsiparis yang dinamis.
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan;

## 22. Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Tabel 30. Target dan realisasi IKU 22 periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada (unit)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Berdasarkan tabel diatas, sampai dengan akhir Triwulan I 2025, belum ada capaian, pengukuran dilakukan pada triwulan IV 2025.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya; dan
2. Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.
3. Melakukan tahapan-tahapan penunjang dalam menggali ide/gagasan agar sesuai dengan kebutuhan.

## 23. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA

Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 31. Target dan realisasi IKU-24 periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%

Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sampai dengan akhir Triwulan I 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan untuk mengawal dan memenuhi persyaratan agar Direktorat POA mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan;

## 24. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari:

- Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase Target nilai
- Satker Pusat minimal 21 yang akan diukur pada triwulan IV 2025

Tabel 32. Rincian target dan realisasi IKU 24 periode TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan I 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

- Hasilkan Inovasi Satker (HIU) : Melakukan asistensi kepada untuk menghasilkan inovasi pada lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

- Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat : Mencantumkan pada surat undangan agar peserta hadir 5 (lima) menit sebelum rapat
- Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R): Melakukan internalisasi budaya 5R agar ruang kerja lebih rapih
- Upayakan Data Terkini (UPDATE) : Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.
- Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA) : Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif melalui pencatatan dan pengarsipan notula.
- Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT) : Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik
- Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA) : Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.
- ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK) : Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu fokus kerjanya.
- Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP) : Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.
- Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS) : Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apresiasi terhadap kontribusi kerja pegawai sekecil dan sederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobat PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.
- Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green) : Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, penggunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya program Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.



## AKUNTABILITAS

## KEUANGAN

### A. Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan TW I tahun 2025 telah melaksanakan 10 Rincian Output (RO) Kegiatan Pengendalian Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2025. Pagu Direktorat POA sebesar Rp261,077,977,000 (dua ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran Direktorat POA pada TW I Tahun Tahun 2025 sebesar Rp16,333,733,126 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 6.26% dari Pagu anggaran.

Tabel 36. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW I Tahun 2025

NO	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	255,425,477,000	16,225,188,335	6.35
1	RCG. 001. Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	37,105,207,000	284,356,349	0.77
2	QHD. 001 Operasi Kapal Pengawas (Hari Operasi)	176,070,270,000	12,074,884,864	6.86
3	QHD. 002 Operasi Pesawat Patroli	40,000,000,000	3,860,584,622	9.65

(Hari Operasi)

<b>4</b>	BKB. 001 Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau	1,183,000,000	5,362,500	0.45
<b>5</b>	FBA. 001 Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada	547,000,000	-	-
<b>6</b>	AFA. 001. NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	220,000,000	-	-
<b>7</b>	ABW. 001. Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	300,000,000	-	-
<b>2352</b>	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5,322,000,000	104,172,291	1.96
<b>8</b>	RDS. 001. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3,811,000,000	88,213,291	2.31
<b>9</b>	ACA. 001 Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1,511,000,000	15,959,000	1.06
<b>2353</b>	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	330,500,000	4,372,500	1.32

<b>10</b>	BKB. 001. Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	330,500,000	4,372,500	1.32
-----------	---	-------------	-----------	------

	<b>TOTAL PAGU</b>	261,077,977,000	16,333,733,126	6.26
--	-------------------	-----------------	----------------	------

---

## B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pengendalian Operasi Armada selalu berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2025, Direktorat Pengendalian Operasi Armada dinilai cukup efektif dalam menggunakan sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 104,52% (Kriteria: Baik), sedangkan anggaran yang digunakan terealisasi sebesar 6.26%.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengendalian Operasi Armada telah melaksanakan beberapa hal antara lain: (1) memaksimalkan kinerja operasi melalui Pesawat Patroli Udara (*airborne surveillance*) untuk memberikan target operasi terverifikasi. Pola ini dikenal dengan istilah *intercept*. Pola ini memberikan target yang jelas kepada Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di laut, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak kapal pengawas. (2) melakukan rapat-rapat koordinasi secara virtual sehingga mampu meminimalkan pengeluaran biaya. (3) mengurangi penggunaan kertas dan dokumen tercetak sehingga mampu mengurangi biaya operasional perkantoran.

## C. Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Direktorat Pengendalian Operasi Armada melaksanakan beberapa kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja di tahun 2025 :

- **Aspek Operasi Armada**  
Berpartisipasi dalam kegiatan operasi bersama baik dalam dan luar negeri seperti Gannet Ausindo, Patkor Optima Malindo, Operasi Interdiksi BNN, Operasi Bersama Bakamla, Operasi Bersama Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), dan lain lain. Selain itu, pola operasi *integrated surveillance system* (ISS) mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi.
- **Aspek Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP**  
Melakukan koordinasi/pengendalian rutin dengan pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kapal pengawas dengan skema PHLN. Selain itu, senantiasa proaktif dalam menyediakan dokumen pendukung dalam proses bukan blokir anggaran.
- **Aspek Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas**  
Optimalisasi penggunaan teknologi dalam memenuhi dan melakukan monitoring penggunaan logistik kapal pengawas. Hal tersebut mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan.

- **Aspek Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP**  
Pada tahun 2025, akan dilaksanakan penilaian kondisi sarana pengawasan SDKP oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk mengetahui kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan, untuk itu Direktorat POA telah menyiapkan rencana pelaksanaan penilaian. Selain itu, optimalisasi peran Port Engineer (PE) dan melakukan evaluasi kinerjanya. Peran PE diharapkan mampu memberikan deteksi dini terkait kerusakan kapal pengawas dan transfer pengetahuan dalam konteks pemeliharaan kapal pengawas secara tepat untuk meminimalisir kerusakan yang lebih fatal.
- **Aspek Sistem dan Informasi Intelijen SDKP**  
Pengembangan sistem pemantauan SDKP secara berkesinambungan dan peningkatan pemahaman pengguna aplikasi melalui Bimtek dapat meningkatkan keandalan operasional sistem pemantauan SDKP dalam memberikan data dan informasi.
- **POA Virtual Class**  
Direktorat Pengendalian Operasi Armada secara berkesinambungan melaksanakan POA Virtual Class berupa inhouse training secara daring maupun luring dalam rangka meningkatkan kapasitas personel serta sharing knowledge untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.



# Penutup



## A. Kesimpulan

1. Nilai capaian kinerja rata-rata Direktorat POA periode TW I Tahun 2025 sebesar 104,52% dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja tersebut, yaitu sebesar Rp16,333,733,126 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 6.26% dari Pagu anggaran.
2. Jumlah Indikator Kinerja Direktorat POA tahun 2025 adalah sejumlah 24 indikator kinerja. Dari target 24 Indikator Kinerja tersebut, sejumlah 7 diukur pada Triwulan I 2025. Dari 7 IKU yang diukur, sebanyak 3 IKU tercapai 100% dan 4 IKU tercapai lebih dari 100%.
3. Pada TW I tahun 2025 terjadi depresiasi nilai kinerja organisasi sebesar 10,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis data yang disajikan pada Laporan Kinerja Direktorat POA periode Triwulan I tahun 2025, telah berjalan dalam rel yang benar. Hanya saja tentu masih perlu penyempurnaan pada periode Triwulan II 2025. Beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan kinerja TW II tahun 2025, yakni sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Memastikan seluruh Indikator Kinerja lingkup Direktorat POA tercapai sesuai target yang ditetapkan khususnya untuk kinerja yang pengukurannya di akhir tahun	Konsisten melakukan evaluasi secara berkala melibatkan penanggungjawab IKU pada level Tim Kerja lingkup Direktorat POA
Memaksimalkan alokasi anggaran non blokir untuk menunjang kegiatan pengendalian operasi armada	Melaksanakan evaluasi rencana aksi pencapaian kinerja Direktorat POA secara berkala

# LAMPIRAN



# Lampiran 1. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat POA Periode Triwulan I 2025



NKO Maret - 2025

Download

Unit Kerja : DIREKTORAT PENGOEDAHAN OPERASI ARMADA  
 Skor Kinerja : 104.34

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✘, silakan file-nya di upload kembali, dengan cara klik tombol 📄
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara klik tombol Tambah Data Dukung➕

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
<b>SK.01</b>	<b>Terselenggaranya sosialisasi penyadaran masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif</b>											
IKSK.01	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadaran masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
<b>SK.02</b>	<b>Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif</b>											
IKSK.02.1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
<b>SK.03</b>	<b>Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi</b>						116,27			116,27		
IKSK.03.1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI Data Dukung1 ✓ 📄	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.03.2	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Inteljen SDKP Data Dukung1 ✓ 📄	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	20,00	23,33	116,65	20,00	23,33	116,65	11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.03.3	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Data Dukung1 ✓ 📄	Indeks	Maximize	Rata-rata	82,00	82,00	95,35	116,26	82,00	95,35	116,26	11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.03.4	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
<b>SK.04</b>	<b>Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif</b>						102,74			102,74		
IKSK.04.1	Indeks operasi kapal pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.04.2	Indeks operasi pesawat patroli Data Dukung1 ✓ 📄	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	90,00	94,92	105,47	90,00	94,92	105,47	11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.04.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Data Dukung1 ✓ 📄	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.04.4	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
<b>SK.05</b>	<b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</b>											
IKSK.05.1	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.05.2	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	Indeks	Maximize	Rata-rata	100,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.05.3	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.05.4	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.05.5	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
<b>SK.06</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>						100,00			100,00		
IKSK.06.1	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.06.2	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.06.3	Nilai PM SAKIP Saker lingkup Digen PSDKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.06.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Digen PSDKP Data Dukung1 ✓ 📄	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.06.5	Nilai Pengawasan Keabsahan Internal unit Kerja lingkup Selsdgen PSDKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.06.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Data Dukung1 ✓ 📄	%	Maximize	Rata-rata	95,00	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	100,00	11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.06.7	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.06.8	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.06.9	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		11-Apr-2025 17:37
	Tambah Data Dukung➕											

Print

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor: 724/DJPSPDKP.3/RC.610/IV/2025

Yth. : Direktur Pengendalian Operasi Armada  
Dari : Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Kelautan dan Perikanan  
Hal : Capaian IKU TW I Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan  
Tanggal : 11 April 2024

Sehubungan dengan hasil pengukuran IKU Triwulan I Tahun 2025 Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN I		
			TAHUN 2025	TARGET	REALISASI CAPAIAN	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	1 Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	100	100	100	100%
		2 Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	82	20	23,33	116,67%
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	82	82	95,35	116,28%

Adapun untuk data dukung capaian telah diunggah di tautan berikut [https://bit.ly/datadukung\\_TW1](https://bit.ly/datadukung_TW1).

Demikian kami sampaikan, mohon perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Herry Mulyono

Tembusan:

Katimja Dukungan Manajemen POA secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**Lampiran 3.** Perhitungan persentase cakupan WPPNRI yang dipantau pemanfaatan SDKP Triwulan I 2025

Rumus Pehitungan CAPAIAN IKU Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%)  
 TRIWULAN I 2025

Formula:

$$X = (x1/x2) \cdot 100\%$$

Keterangan:

x: Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%)

x1: Jumlah WPP NRI yang dipantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP

x2: Jumlah WPP NRI

X1 = 11 WPPNRI

X2 = 11 WPPNRI

$$\text{Capaian TW I} = (11/11) \times 100\% = 100\%$$

Jakarta, 08 April 2025



Herry Mulyono

**Lampiran 4.** Perhitungan capaian IKU pemenuhan data dan analisis periode Triwulan I 2025

PERHITUNGAN CAPAIAN IKU PEMENUHAN DATA DAN HASIL ANALISIS  
 TRIWULAN I 2025

No	Indikator	Bulan			Bobot	Perhitungan
		Jan	Feb	Mar		
1	Analisis Indikasi Pelanggaran	1	1	1	40	10
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	20	5
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	20	5
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	0	1	20	3,333333333
<b>Indeks</b>						<b>23,33</b>

Jakarta, 8 April 2025

Katimja PSIIPK



Herry Mulyono

**Lampiran 5.** Rincian Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Operasi Pesawat Patroli periode Triwulan I 2025

Target dan Realisasi Capaian Kinerja lingkup Operasi Armada  
Periode Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Capaian TW I	%
1	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (indeks)	95	90	94,92	<b>105,47</b>

**Lampiran 6.** Penyampaian capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

MEMORANDUM  
Nomor 715/DJPSDKP.3/TU.140/IV/2025

Yth. : Direktur Pengendalian Operasi Armada  
Dari : Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Logistik  
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Periode TW I Tahun 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 8 April 2025

---

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada Periode Triwulan I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim kerja Pengawasan dan Logistik sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

  
Nuzul Fadly

Tembusan:  
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

PERSENTASE PEMENUHAN LOGISTIK ARMADA PENGAWASAN

No	Indikator Pemenuhan Logistik	PERIODE				Bobot	Maksimal Persentase	Perhitungan		Keterangan/Data Dukung
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (4/4)	1				30	100%	30	a	BA, BBM Akhir Bulan dan Surat Aju BBM Kapal
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (4/4)	1				20	100%	20	b	Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (4/4)	1				25	100%	25	c	Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor (Scan)
4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (4/4)	1				15	100%	15	d	Surat Pengantar Kebutuhan Air Bersih dari Kapal Ke Kantor (Scan)
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (4/4)	1				5	100%	5	e	Surat Pengantar Kebutuhan ATK / Bahan Komputer dari Kapal Ke Kantor (Scan)
6	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (4/4)	1				5	100%	5	f	Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI
<b>Persentase</b>						<b>100</b>		<b>100</b>		

Ketua Tim Kerja Pengawakan dan Logistik

Nuzul Fadly



## Lampiran 7. Hasil Penilaian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id). SUREL [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

---

Nomor : B.1477/PSDKP.1/OT.710/IV/2025 14 April 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian  
Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan I  
Tahun 2025 Lingkup Ditjen. PSDKP

Yth.

1. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
  2. Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
- di  
Jakarta

Bersama ini disampaikan Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sebagaimana terlampir untuk mendapat perhatian pada pelaksanaan realisasi atas rencana pengendalian risiko pada Triwulan I Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:  
Direktur Jenderal PSDKP

## HASIL PENILAIAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada Tabel. 1 berikut:

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	4	4	100%
	Direktorat POA	12	12	100%
	Direktorat PPSDP	8	8	100%
	Direktorat PPSDK	10	10	100%
	Direktorat PP	12	12	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	3	3	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	7	7	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	18	18	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	4	4	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	23	23	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	6	6	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	9	9	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	12	12	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	4	4	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	15	15	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	7	7	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	8	8	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	8	8	100%
15	Stasiun PSDKP Biak	5	5	100%
<b>Total</b>		<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100%</b>

a.n. Direktur Jenderal  
Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Suharta

**Lampiran 8.** Data dukung IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP periode Triwulan I 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

Nomor : B.1437/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2025 11 April 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Penyampaian Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja" Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2025

Yth. Pejabat (daftar terlampir)

Di tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode Triwulan I Tahun 2025 khususnya capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP", berikut ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d 31 Desember 2024 (Triwulan IV 2024) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.
2. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 397/ITJ.0/TU.140/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2025, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan I Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar **100.00% (tuntas 143 rekomendasi dari 143 rekomendasi)**.
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Ditjen PSDKP disampaikan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:  
Direktur Jenderal PSDKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II Surat Dinas

Nomor :B.1437/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2025

Tanggal :11 April 2025

### Data Rekapitulasi Capaian IKU

#### “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP” Triwulan I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	41	41	100.00	0	0
2	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	0	0	-	0	-
3	Direktorat Pengawasan SDK	0	0	-	0	-
4	Direktorat Pengawasan SDP	0	0	-	0	-
5	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-
6	Pangkalan PSDKP Lampulo	2	2	100.00	0	0
7	Pangkalan PSDKP Batam	0	0	-	0	-
8	Pangkalan PSDKP Jakarta	0	0	-	0	-
9	Pangkalan PSDKP Benoa	11	11	100.00	0	0
10	Pangkalan PSDKP Bitung	20	20	100.00	0	0
11	Pangkalan PSDKP Tual	12	12	100.00	0	0
12	Stasiun PSDKP Cilacap	11	11	100.00	0	0
13	Stasiun PSDKP Belawan	22	22	100.00	0	0
14	Stasiun PSDKP Kupang	10	10	100.00	0	0
15	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100.00	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara